

## FOKUS DAN RUANG LINGKUP

Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum dan kebijakan hasil penelitian, kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

## FREKUENSI PUBLIKASI

Terbit sebanyak tiga kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juli, dan November.

## LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1978-2292

e-ISSN 2579-7425

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan>

## INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Neliti; dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

## KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

## ALAMAT KORESPONDENSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jalan H.R. Rasuna Said  
Kavling 4-5, Jakarta Selatan  
12940  
Telepon 021- 2525015  
Faksimili 021-2526438  
Laman :  
[www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Email:  
[ejournalkebijakan@gmail.com](mailto:ejournalkebijakan@gmail.com)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Indexed by:



Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Pembina** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pengarah** : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM  
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
- Ketua Dewan Redaksi (Editor)** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)** : 1. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.  
2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.  
3. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.  
4. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.  
5. Haryono, S.Sos., M.H.  
6. Imam Lukito, S.T., M.H.
- Redaksi Pelaksana** : 1. Fitriyani, S.H., M.Si.  
2. Jaya Laksana, S.E.
- Sekretariat** : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.  
2. Asmadi, S.H.
- Tata Usaha** : Suwartono
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : 1. Machyudhie, S.T.  
2. Risma Sari, S.Kom  
3. Saefullah, S.ST., M.Si  
4. Agus Priyatna, S.Kom
- Alih Bahasa** : Harry Fonte Sugiarto  
(*Interlingua Translation Centre*)

#### Alamat Redaksi

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. 021-2525015 ext. 512/514 Fax. 021-2522954

[balitbangkumham@gmail.com](mailto:balitbangkumham@gmail.com)  
[ejournalkebijakan@gmail.com](mailto:ejournalkebijakan@gmail.com)  
[jurnalkebijakan@balitbangham.go.id](http://jurnalkebijakan@balitbangham.go.id)

## DAFTAR ISI

### HASIL PENELITIAN (ARTICLES)

1. Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah ..... 1 – 19  
**Taufik H. Simatupang**
2. Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur ..... 21 – 38  
**Nizar Apriansyah**
3. Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV dalam Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan HAM RI..... 39 – 56  
**Edward James Sinaga**
4. Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong ..... 57 – 71  
**Insan Firdaus**
5. Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... 73 – 87  
**Rr. Susana Andi Meyrina**

### TINJAUAN HUKUM (REVIEW)

6. Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian ..... 89 – 105  
**Ahmad Jazuli**
7. Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian .. 107 – 118  
**Budy Mulyawan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkelaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 12 Nomor 1 Bulan Maret 2018 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Peraturan Perundang-undangan, Peradilan, Hukum, dan Manajemen Kepemimpinan. Disamping itu, terdapat dua tulisan tentang Keimigrasian (tulisan lepas/review) yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM serta tenaga pengajar (widyaiswara) dari Poltekim Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

**Selamat Membaca,**

**R E D A K S I**

# JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

p-ISSN 1978-2292  
e-ISSN 2579-7425

*Volume 12, Nomor 1, Maret 2018*

Volume 12, Nomor 1, Maret 2018

p-ISSN: 1978-2292

e-ISSN: 2579-7425

# JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Taufik H. Simatupang (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights*)

***Juridical Analysis on Roles of Regional Offices of The Ministry of Law and Human Rights in Management and Administration of Database of Regional Laws and Regulations***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2018

*Successful legal reform and revitalization are significantly determined by different aspects. One of the aspects is the administration of quality regulations, not overlapping, investment-friendly and upholding and respecting the human rights, both at the Central and Regional levels. In performing the roles of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights as the fosterer and coordinator of the harmonization and synchronization of regional laws and regulations drafts, the activity of preparing the regional legal products inventory becomes important as the inventory will serve as the basis for the development, administration and management of the database of regional legal products. By the good administration of the database the roles of Regional Office of in the development of national legal system is expected to improve. The subject of this research is the administration and management of the database of regional laws and regulations that had been implemented all this time, roles of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights as well as the impending factors. From the result of the research, it may be concluded that the roles of Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the management and administration of database of regional laws and regulations have not been optimal. Therefore, amendment is required to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 28 of 2014 regarding Organization and Work Procedures by additional power to conduct analysis against any products of Regional Regulations issued by the Regional Government. It is necessary to improve the quantity and quality of competent human resources in information and technology through Technical Training and Guideline, supporting budget and adequate facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Roles of Regional Office, Legal Data and Information Network, Management and Administration of Database, Regional Legal Products*

Nizar Apriansyah (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights*)

***Roles Of The Illegal Levy Eradication Unit Of The Ministry Of Law And Human Rights In Creating Apparatuses Accountability And Integrity***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2018

*This research is aimed to solve the problems related to the Roles of Illegal Levy Eradication Unit of the Ministry of Law and Human Rights. The subjects of this research are, firstly, the roles of the Illegal Levy Eradication Unit and the barriers that hamper the eradication of illegal levy. Secondly, the roles of Illegal Levy Eradication Unit in creating apparatuses accountability and integrity during the performance of their duties and functions. The method employed in this the research mixes normative research method and empirical research method (mixed methods). Data are collected by disseminating questionnaires to the members of Illegal Levy Eradication Unit teams, the public services officials and the people using the services. Sampling locations observe the representation of Western, Central and Eastern Indonesia areas. The research shows that the Illegal Levy Eradication Unit has operated well but not to its maximum level, and there have been some barriers in their performance among others, there have been no specifically designated budget to support the activities of the Illegal Levy Eradication Unit, no regulation on work mechanism and no standard operational procedures. Correlation index between the roles of Illegal Levy Eradication Unit in creating apparatuses accountability and integrity during the performance of their duties and functions in average has demonstrated positive correlation.*

**Keywords:** *Eradication, Illegal Levy, Ministry Of Law And Human Rights*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Edward James Sinaga (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights*)

***The Implementation of Grades II, III And IV Management Leadership Education and Training in the Change Project of The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2018

*Leaders may be created by many ways. One of them is by shaping the competencies of the leadership through education and training, This leadership education and training are in accordance with the Regulations of the Head of State Administration Institution No. 18, 19, and 20 of 2015 regarding the Guideline for Holding Grades II, III and IV Leadership Education and Training. The education and training should employ new approach or pattern in a line with the change project. This research uses qualitative approach. The purpose of this research is to analyze the implementation of education and training and continuity of the change project. This research covers three issues i.e. the planning of the change project, post-education and training implementation, and expectation and challenges during the implementation. One of the success keys of the change project is discipline during the realization, so that the change project may be successfully implemented. For such purpose, it is necessary to provide for post-education and training evaluation by means of the regulations of the Minister of Law and Human Rights.*

**Keywords:** *Education, Training, Leadership*



Insan Firdaus (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights*)

## ***Optimalization of Traditional Cross-Border Posts within The Scope of Performance of Immigration Functions***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2017

*Traditional Cross-Border Posts play significant and strategic roles in supporting the development of border areas, by providing services and overseeing the traffics of the residents around the borderline. The Law No. 6 of 2011 regarding Immigration provides for that the immigration functions at the cross-border posts should be performed by immigration officers. The subject of this research is the performance of the immigration functions at the Traditional Cross-Border Post of Class II Immigration Office of Entikong. This research is descriptive analysis in nature and uses qualitative approach. According to the research the performance of the immigration functions at traditional cross-border post in Immigration Office of Entikong has not been optimal. This was due to some barriers from various aspects, among others institutional barrier, limited human resources and lack of supporting facilities and infrastructures. To make the Traditional Cross-Border Post optimal, within the scope of performance of immigration functions, it is necessary to strengthen the institution, raise the number of immigration officers and competencies of the officers of the Traditional Cross-Border Post and to provide more supporting facilities and infra-structure.*

**Keywords:** *Border, Immigration, Cross-Border Post*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Susana Andi Meyrina (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights*)

***Optimalization of Gratification Reporting Function The Ministry of Law and Human Rights***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2018

*"The Efforts to Optimize the Gratification Reporting Functions at the Ministry of Law and Human Rights" are the scope of this paper, aimed to optimize the Gratification Reporting Functions at the Ministry of Law and Human Rights. The solution recommended or problems encountered by UPG are, firstly: the internal and external improvements of system and work program of UPG have not been optimized; Secondly, the improvement of the integrity of the employees working in the areas prone to gratification who have not understood the required reporting; Thirdly, the gratification control reporting processes at the Ministry of Law and Human Rights have not been operating optimally. This paper employs normative legal research method and qualitative approach as supporting methods in the forms of words and languages, at a special context that naturally descriptive in connection with the existing laws and regulations as the basis for the implementation toward the successful provision of gratification-free public services.*

**Keywords:** *Optimization, reporting function, Gratification*

Ahmad Jazuli (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, the Ministry of Law and Human Rights*)

## ***The Existence Of Foreign Workers In Indonesia From The Immigration Law Perspective***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2018

*The rumor of 10 million foreign workers from China storming here has created speculations related to their activities during their presence in the territory of the Republic of Indonesia as well as disparity (discrepancy) of total number of foreign workers according to the Ministry of Law and Human Rights (around 31 thousand workers) and according to the Minister of Manpower (around 21 thousand) of all foreign workers in Indonesia. By applying juridical normative approach to the case, this research is conducted to analyze the laws and regulations related to foreign workers and the supervision and control mechanisms done by the related agencies. The basic philosophy of employing foreign workers is as a series of efforts to raise the investment, technology transfer and competency transfer to the Indonesian workers, as well as expansion of job opportunities, therefore foreign investment in Indonesia should be solely aimed for the welfare of Indonesian people. The research shows that the implementation of the regulations related to foreigners and their activities during their presence in the Indonesian territory has not been maximum, the coordination of foreigners control team is weak and there has been an increase on the immigration violation committed by the foreigners.*

**Keywords:** *Foreign Workers, Regulation, Immigration*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

**Budy Mulyawan (Immigration Polytechnic, The Agency of Human Resource Development on Legal and Human Rights)**

***The Power of Electronic Information as Evidence in the Investigation of Immigration-Related Crimes***

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 1, Maret 2018

*The law enforcement function of immigration affairs is implemented in the forms of Immigration Administrative Actions and other Actions that are Pro Justitia or investigation in nature. When conducting investigations, Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) sometimes encounter an issue in using evidences which are currently extremely limited amid the rapid changes that happened to the people. In the investigation of immigration-related crime, there are two (2) evidences not provided for in the Indonesian Penal Procedural Code (KUHAP), one of them is the electronic information evidence, that may be submitted as additional evidences during the examination processes. The evidence in the form of electronic information has seldom been used, as its effectiveness is considered less reliable. Nevertheless, in general, the evidence may be required if the other evidences have failed to meet the minimum requirements of evidencing processes provided for in the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Evidence, Electronic Information, Investigation.*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Taufik H. Simatupang (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)**

**Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 1, Maret 2018

Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek. Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dalam pelaksanaan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan koordinator harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, maka kegiatan inventarisasi produk hukum daerah menjadi penting sebagai dasar mengembangkan pengelolaan dan pelayanan database produk hukum daerah. Dengan tertatanya database diharapkan dapat meningkatkan peran Kantor Wilayah dalam pembangunan sistem hukum nasional. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah yang sudah dilaksanakan selama ini, peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan faktor-faktor penghambat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan database peraturan perundang-undangan di daerah belum maksimal. Oleh karena itu perlu perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan menambah kewenangan melakukan analisis setiap produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan teknologi melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

**Kata Kunci:** Analisa Yuridis, Peran Kantor Wilayah, Jaringan Data dan Informasi Hukum, Pengelolaan dan Pelayanan Database, Produk Hukum Daerah

Nizar Apriansyah (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

## Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Integritas Aparatur

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Maret 2018

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan Peran Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini pertama bagaimana peran Unit Pemberantasan Pungli dan apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sapu bersih pungutan liar. Kedua bagaimana peran Unit Pemberantasan Pungli dapat mewujudkan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris (*mixed methods*). Pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada anggota tim Unit Pemberantasan Pungli, Petugas unit layanan dan masyarakat pengguna layanan. Sampel lokasi didasarkan atas keterwakilan wilayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Unit Pemberantasan Pungli sudah berjalan tetapi belum maksimal, dan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya belum tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungli, mekanisme kerja belum diatur dan belum ada standar operasional prosedur. Tingkat korelasi antara peran Unit Pemberantasan Pungli dalam mewujudkan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rata-rata menunjukkan tingkat korelasi yang positif.

**Kata Kunci:** Pemberantasan, Pungutan, Liar, Kemenkumham

## Kata Kunci Bersumber dari Artikel

### Lembar Abstrak Ini Dicoopy Tanpa Izin dan Biaya

Edward James Sinaga (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

**Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV Dalam Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan HAM RI**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 1, Maret 2018

Pemimpin dapat dibentuk melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk pembentukan kemampuan kepemimpinan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV. Pendidikan dan pelatihan tersebut menggunakan pendekatan atau pola yang baru dengan proyek perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan proyek perubahan. Penelitian ini meliputi tiga hal yaitu perencanaan proyek perubahan, pelaksanaan pasca pendidikan dan pelatihan, serta harapan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kunci keberhasilan proyek perubahan adalah kedisiplinan dalam eksekusi, sehingga proyek perubahan dapat diimplementasikan. Untuk itu perlu pengaturan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Pelatihan, Kepemimpinan

## Kata Kunci Bersumber dari Artikel Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

**Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)**

### **Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 1, Maret 2018

Pos Lintas Batas tradisional keimigrasian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk di sekitar garis perbatasan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di pos lintas batas dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas tradisional di Kantor Imigrasi Klas II Entikong. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan fungsi keimigrasian Pos Lintas Batas tradisional di Kanim Entikong belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan beberapa hambatan dari berbagai aspek, antara lain kelembagaan, terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana pendukung. Untuk mengoptimalkan Pos Lintas Batas tradisional dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi dan kompetensi petugas Pos Lintas Batas tradisional serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.

**Kata Kunci: Perbatasan, Imigrasi, Pos Lintas Batas**

**Susana Andi Meyrina (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)**

### **Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 1, Maret 2018

"Upaya Mengoptimalkan Fungsi Laporan Gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM" adalah ruang lingkup dari makalah ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi UPG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Solusi dan kendala yang tiap UPG di Unit, Pertama adalah: Belum dapat berjalan secara optimal dalam meningkatkan sistem atau program kerja di UPG baik dari internal maupun eksternal; Kedua, Dalam rangka meningkatkan integritas kinerja karyawan yang rentan terhadap penerimaan terkait gratifikasi belum mengerti wajib lapor; Ketiga, belum berjalannya secara maksimal laporan pengendalian gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative pendekatan kualitatif sebagai metode pendukung berupa bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah secara diskriptif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar untuk diimplementasikan menuju kesuksesan pelayanan publik bebas dari gratifikasi.

**Kata Kunci: Optimalisasi, Fungsi Pelaporan, Gratifikasi**



## Kata Kunci Bersumber dari Artikel Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Ahmad Jazuli (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

### Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 1, Maret 2018

Isu serbuan 10 juta Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok menimbulkan spekulasi terkait persoalan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia serta adanya disparitas (perbedaan) jumlah Tenaga Kerja Asing antara Kementerian Hukum dan HAM (kisaran 31 ribu orang) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (sekitar 21 ribu) dari keseluruhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dengan pendekatan kasus yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait Tenaga Kerja Asing dan mekanisme pengawasan dan pengendaliannya yang dilakukan instansi terkait. Filosofi dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya implementasi peraturan terkait orang asing dan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia, lemahnya koordinasi tim pengawasan orang asing dan terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Asing, Regulasi, Keimigrasian

## Kata Kunci Bersumber dari Artikel Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Budy Mulyawan (Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM)

### **Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018

Fungsi penegakan hukum Keimigrasian dilaksanakan yaitu dalam bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan yang bersifat Pro Justitia atau penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terkadang menghadapi suatu permasalahan yaitu penggunaan alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Dalam alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian terdapat 2 (dua) alat bukti di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satunya adalah alat bukti informasi elektronik, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan. Penerapan terhadap alat bukti informasi elektronik tersebut masih jarang digunakan sehingga tingkat efektivitasnya dinilai kurang. Meskipun pada umumnya alat bukti tersebut baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Alat Bukti, Informasi Elektronik, Penyidikan.**